



Laporan Keuangan (CaLK)

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Semester II Tahun 2025



Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dalam hal ini bertindak sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tual, 31 Desember 2025

Kepala Pelabuhan
Perikanan Nusantara Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Recky Pangemanan

NIP.19810803200502 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	-

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL

JL. Dumar Kota -Tual
TELEPON 0911 - , FAXIMILE 0911 -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tual, 31 Desember 2025

Kepala Pelabuhan
Perikanan Nusantara Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Recky Pangemanan

NIP.19810803200502 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan periode 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 907,183,302,- atau mencapai 197,8 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 458,590,000,- sedangkan,

Realisasi Belanja Negara periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9,105,194,459,- atau mencapai 99,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.888.488.128,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2025, Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp154,951,598,520,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp35,124,615,- Aset Tetap sebesar Rp154,767,486,170,- serta Aset Lainnya sebesar Rp148,987,735,- Terdapat Juga Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp21,687,304,- Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp0,- Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp352,619,384,- dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp0. serta Ekuitas sebesar Rp154,577,291,832,- sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas PPN Tual sebesar Rp154,951,598,520,-.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp715,087,887,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp97,047.568.434,- Sehingga Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp(96,332,498,547),- Sementara itu untuk Kegiatan Non Operasional terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp500,000,056,- yang berasal dari Surplus/Defisit Pelepasan Aset sebesar Rp0,- yang merupakan pendapatan dari Pelepasan Aset sebesar Rp(0,-) dan pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp0,- Terdapat juga Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(95,832,598,491),- yang berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.500,000,056,- Dengan demikian entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(95,832,598,491),-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp242,203,281,666,- ditambah dengan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(95,832,598,491),- kemudian ditambah lagi dengan Koreksi Yang Menambah Ekuitas sebesar Rp0 Nilai ini berasal dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp0,- dan Koreksi Lain-lain sebesar Rp0,- Terdapat pula Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8,206,508,657,- sehingga diperoleh kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp(87,625,989,834),- Dengan demikian Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp154,577,291,832,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	31 Des 2025		% Terhadap Anggaran	31 Des 2024	% Kenaikan/ Penurunan
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	458.590.000	907.183.302	197,9	848.199.438	140.87
JUMLAH PENDAPATAN		458.590.000	907.183.302	197,9	848.199.438	140.87
BELANJA	B.2				-	
Belanja Pegawai	B.2.1	5.595.349.000	5.575.794.624	99.65	5.248.480.537	99.62
Belanja Barang	B.2.2	2.900.680.000	2.801.175.655	96.56	4.397.497.614	99.98
Belanja Modal :	B.2.3	922.390.000	728.224.180	78.95	1.242.509.977	99.94
JUMLAH BELANJA		9.418.599.000	9.105.194.459	96.67	7.066.193.301	99.8%

II. NERACA

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
ASET	C.1				
ASET LANCAR	C.1.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	-	0	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	1	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.1.2	34.388.615	-	34.388.615	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.3	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.1.4	-	-	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.1.5	-	-	-	-
Persediaan	C.1.1.6	737.000	1.671.000	(935.000)	(55.95)
JUMLAH ASET LANCAR	C.1.1.7	35.124.615	1.671.000	33.453.615	2,002.01
ASET TETAP	C.1.2				
Tanah	C.1.2.1	11.683.335.000	11.683.335.000	-	-
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	8.272.198.494	7.591.595.314	680.603.180	8.97
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	23.863.312.1810	23.513.312.181	350.000.000	1.49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.2.4	830.394.227.500	830.244.227.50	150.000.000	0.02
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.5	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.6	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.1.2.7	(719.445.587.005)	(630.831.986.408)	(88.613.600.597)	14.05
JUMLAH ASET TETAP	C.1.3	154.767.486.170	242.200.483.587	(87.432.997.417)	(36.10)
ASET LAINNYA	C.1.3.1				
Aset Tak Berwujud	C.1.3.2	-	-	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.3.3	-	103.200.000	-	-
Aset Lain-Lain	C.1.3.4	485.235.000	714.782.166	5.828.608.006	815,44
AKUMULASI PENYUSUTAN /AMORTISASI ASET LAINNYA		(336.247.265)	(568.759.036)	(5.170.697.969)	909,12
JUMLAH ASET LAINNYA	C.1.4	148.987.735	249.223.130	657.910.037	222,58
JUMLAH ASET	C.1.4	154.951.598.520	102.007.313.177	401.133.996	0,22
KEWAJIBAN	C.1.4.1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.1.4.2				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.1.4.3	-	-	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.1.4.4	65.185.824	43.498.520	(21.811.216)	(50.14)
Pendapatan Diterima Dimuka		0	-	0	-
Uang Muka dari KPPN	C.1.4	352.619.3844	126.135.410	226.483.974	179.56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.1.4	0	-	0	-
EKUITAS	C.1.3.1	374.306.688	169.633.930	204.472.758	120.66
EKUITAS					
Ekuitas		154.533.793.3127	101.038.114.419	638.478.115	0,63
JUMLAH EKUITAS		154.951.598.520	101.038.114.419	638.478.115	0,63

II. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Des 2025	31 Des 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	715.087.887	655.894.522	59.193.365
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		715.087.887	655.894.522	59.193.365
BEBAN	D.1.2			
Beban Pegawai	D.1.3	5.575.794.624	5.248.315.887	305.724.737
Beban Persediaan	D.1.4	34.205.000	27.246.000	6.959.000
Beban Barang dan Jasa	D.1.5	2.044.394.299	2.421.441.862	(398.792.083)
Beban Pemeliharaan	D.1.6	660.934.450	728.901.147	(67.966.697)
Beban Perjalanan Dinas	D.1.7	84.264.210	1.174.990.357	(1.090.726.147)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.8	88.691.492.371	88.711.152.626	(19.660.255)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	-
JUMLAH BEBAN		97.091.084.954	98.312.047.879	(1.264.461.445)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	(96.375.997.067)	(97.656.153.357)	1.323,654.810
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2.1			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.2	-	-	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.2	-	(1.031.548.888)	1.031.548.888
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	500.000.056	81.515.000	(81.515.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	500.000.056	5.489.073	494.501.983
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		500.000.065	(1.026.050.815)	1.526.050.871
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(95.875.997.011)	(98.682.204.172)	2.849.705.681
SURPLUS/DEFISIT LO		(95.875.997.011)	(98.682.204.172)	2.849.705.681

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan/Penurunan
EKUITAS AWAL	E.1	242.203.281.666	330.847.498.555	(88.644.216.889)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(95.832.498.491)	(98.682.204.172)	2.806.207.161
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	(2.301.407)	2.301.407
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.1	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	-	(2.301.407)	2.301.407
LAIN_LAIN	E.3.3	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.206.508.657	10.040.288.690	(1.833.780.033)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(87.625.989.834)	(88.644.216.889)	1.018.227.055
EKUITAS AKHIR	E.6	154.577.291.832	242.203.281.666	(87.625.989.834)

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A. PENJELASAN UMUM

Visi

Visi DJPT yang di dalam bernaung Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sebagai UPT Pusat di daerah tahun 2020-2025 adalah "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang maju dan berkelanjutan serat Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera untuk mewujudkan Indonesia majuyang berdaulat, mandiri dan berkperdibadian berdasarkan gotong royong.

Misi

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- c. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Renstra

Secara khusus arah kebijakan untuk sub sektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing

port), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;

- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU- perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan hak asasi manusia perikanan;
- h. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
- i. pengelolaan perikanan di perairan darat;
- j. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- k. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia/Regional Fisheries Management Organization (RFMOs);
- l. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- m. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
- n. penguatan unit pelaksana teknis perikanan tangkap

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.418.599.000,- Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-032.03.2.622461/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan Revisi DIPA sebanyak Delapan kali dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi POK 1 Tanggal, 06 Mei 2025
- Revisi DIPA 1 Tanggal, 24 Februari 2025
- Revisi DIPA 2 Tanggal, 26 Februari 2025
- Revisi POK 2 Tanggal, 10 Maret 2025
- Revisi DIPA 3 Tanggal, 3 April 2025
- Revisi DIPA 4 Tanggal, 17 April 2025
- Revisi POK 3 Tanggal, 16 Mei 2025
- Revisi DIPA 5 Tanggal, 30 Juni 2025
- Revisi POK 4 Tanggal, 07 Juli 2025
- Revisi DIPA 6 Tanggal, 14 Juli 2025
- Revisi POK 5 Tanggal, 22 Juli 2025
- Revisi POK 6 Tanggal, 9 September 2025
- Revisi DIPA 7 Tanggal, 10 Oktober 2025
- Revisi POK 7 Tanggal, 14 Oktober 2025
- Revisi DIPA 8 Tanggal, 20 November 2025
- Revisi POK 8 Tanggal, 26 November 2025

Realisasi
Pendapatan Rp
907.183.302,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 907.183.302,- atau mencapai 197.8 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 458.590,000,- Pendapatan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual terdiri dari Pendapatan dari Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi dan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Semester II Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0
Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	6.000.000	397.269.500	6621.16
Pendapatan sarana prasarana sesuai dengan tusi	152.770.000	68.103.230	44.58
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	299.820.000	441.810.516	147.36
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Jumlah	458.590.000	907.183.302	197.82

Perbandingan Realisasi Pendapatan sampai dengan 31
Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	0	0	0
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	
Pendapatan sarana prasarana sesuai dengan tusi	68.103.230	298,048,820	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	397.269.500	17,399,688	
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	441.810.516	290,528,669	0
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain		0	
Jumlah	907.183.302	606,530,477	0

*Realisasi
Belanja Rp
9.105.195.375*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor PPN Tual periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 9.105.195.375,- atau 96.67 % dari anggaran belanja sebesar Rp 9.418.599.000Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember T.A
2025 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.595.349.000	5.575.794.624	99.62
Belanja Barang	2.900.860.000	2.801.175.655	99.98

Belanja Modal	922.390.000	728.224.180	0
Total Belanja Kotor	9.418.599.000	9.105.194.459	99.8
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	9.418.599.000	9.105.194.459	99.8

Perbandingan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025
T.A 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	5.575.794.624	5.248.480.537.	99.62
Belanja Barang	2.801.175.655	4.397.497.614	99.98
Belanja Modal	728.224.180	1.242.509.977	99.94
Jumlah	9.105.194.459	10.888.488.128	99.8

*Realisasi
Belanja
Pegawai Rp.
5.575.794.624*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.575.794.624,- atau 96.8 % dari yang dianggarkan sebesar Rp 5.595.349.000,- untuk tahun 2025. Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp 5.248.480.537,- terjadi kenaikan sebesar 0,96 % Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai periode 30 Juni TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya penerimaan ASN CPNS dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor yang turut berpengaruh dalam besarnya anggaran belanja pegawai tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja
Pegawai TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi per 30 Juni 2024	Naik (Turun)%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.435.677.680	1.342.072.700	(99.93)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.187	20.928	(91.76)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	94.142.070	91.693.950	100
Belanja Tunj. Anak PNS	32.960.182	29.788.180	99.99
Belanja Tunj. Struktural PNS	16.380.000	24.200.000	100
Belanja Tunj. Fungsional PNS	140.564.000	147.804.000	100
Belanja Tunj. PPh PNS	12.776.535	10.954.184	99.79
Belanja Tunj. Beras PNS	77.923.920	75.027.120	100
Belanja Uang Makan PNS	230.737.000	176.944.000	95.28
Belanja Tunjangan Umum PNS	32.755.000	26.250.000	100
Jumlah Belanja Gaji PNS	2.073.936.574	1.924.755.062	(4,3)
Belanja Gaji Pokok PPPK	597.708.800	548.994.400	99.94
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.016	11.069	93.85
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	32.541.070	30.558.990	99.99
Belanja Tunj. Anak PPPK	8.080.524	7.956.770	99.97
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	75.600.000	79.980.000	100
Belanja Tunj. Beras PPPK	34.182.240	31.937.220	100
Belanja Uang Makan PPPK	124.202.000	94.826.000	98.71
Jumlah Belanja Gaji PPPK	872.329.650	794.264.449	4,1
Belanja Uang Lembur	-	0	0
Belanja Uang Lembur PPPK	-	0	0
Jumlah Belanja Lembur	-	0	0
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.837.850.060	1.793.596.100	99.74
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	791.678.340	734.865.751	99.97
Jumlah Tunjangan Khusus	2.629.528.400	2.528.461.851	98.8
Jumlah Belanja 51	5.575.794.624	5.595.349.000	96.65

*Realisasi
Belanja Barang
Rp2.801.175.65
5,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.720.252.305 atau sebesar 99.69 % dari yang dianggarkan dan Rp 2.900.860.000,- dan untuk Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp2,329,538,303,- terjadi penurunan sebesar 1,59 persen dari realisasi 30 Juni pada Tahun 2024, Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Terdapat pagu blokir AA yang tidak dapat dibuka atau direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
2. Alokasi anggaran untuk pembayaran petugas pendataan yang

- semula ada di satker di alihkan ke kantor pusat.
3. Terjadi Pengurangan anggaran belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	839.096.250	467.321.207	(28,6)
Belanja barang Non Operasional	48.363.000	127.115.375	(41,6)
Belanja Barang Persediaan	33.900.000	36.324.200	11,4
Belanja Jasa	1.135.247.745	1.129.462.518	(24,1)
Belanja Pemeliharaan	660.304.450	223.859.240	(15,4)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	84.264.210	345.419.763	(37,3)
Jumlah Belanja Kotor	2.801.175.655	2.329.502.303	(28,6)
Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	-	-	-
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	-	-	-
Pengembalian Belanja Langganan Telepon	-	-	-
Pengembalian Belanja Perjadin Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Pengembalian Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Pengembalian Belanja Perjadin Biasa	-	-	-
Jumlah Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	2.801.175.655	2.329.502.303	(28,6)

*Realisasi
Belanja Modal
Rp
666.345.800,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- atau sebesar 78,95 % dari yang dianggarkan dan Rp 666.345.800,- dan untuk tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp 922.390.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal. Sehingga rencana

peningkatan kapasitas kerja Satker PPN Tual perlu peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi Gedung Kantor, pembelian peralatan yang akan digunakan pada gedung yang sudah selesai direnovasi dan untuk peningkatan fasilitas jaringan untuk menunjang pelaksanaan tusi Satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisas i 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	666.345.800	444,973,000	0
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	256,348,000	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	37,547,000	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	50,000,000	0
Jumlah Belanja Kotor	666.345.800	788,868,000	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	666.345.800	788,868,000	0

*Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp 728.224.180,-*

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember TA 2025 sebesar Rp **666.345.800,-** Realisasi tersebut mengalami mengalami Kenaikan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya alokasi anggaran belanja modal pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan
Mesin TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisas i 2025	Realisas i 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	666.345.800	444,973,000	0

Jumlah Belanja Kotor	666.345.800	444,973,000	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	666.345.800	444,973,000	0

Adapun rincian terhadap Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai	Merk/Type/Spesifikasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
JUMLAH					

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp0,-

B.5.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember TA 2025 adalah masing- masing sebesar Rp0,- dan Rp256,348,000,- untuk Tahun 2024. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi anggaran dan tidak ada pembangunan yang prioritas untuk menambah nilai Gedung dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual TA. 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung & Bangunan	0	256,348,000	100

Jumlah Belanja Kotor	0	256,348,000	100
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	256,348,000	100

*Belanja
Penambahan Nilai
Jalan dan Jembatan
Rp0,-*

B.5.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- untuk Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai
Jalan dan Jembatan
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja
Penambahan Nilai
Irigasi Rp0,-*

B.5.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi
Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi periode 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- untuk Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai
Irigasi TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung & Bangunan	0	50,000,000	100
Jumlah Belanja Kotor	0	50,000,000	100

Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	50,000,000	100

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya dana Rupiah Murni.

*Tabel
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan untuk PPN Tual,

*Tabel
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, yang meliputi saldo uang LS Perjalanan Dinas yang Masuk Ke Rekening Bendahara Pengeluaran yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Tabel
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp34.388.615,-

C.1.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per 30 Juni 2025 sebesar Rp 34,388.615,- dan untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	34.388.615	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0
Jumlah	34.388.615	0

Persediaan
Rp736.000

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 736.000,- dan Rp 1.671.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	736.000	1.671.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0

Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	736.000	1.671.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp154.767.486.170

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp154.767.486.170,- untuk Tahun 2025 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp242.200.483.587,-

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp11.683.335.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp11.683.335.000,- dan Rp11.683.335.000,- Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Mutasi
Tanah*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	11.683.335.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	11.683.335.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	11.683.335.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Tanah TA
2025 (dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	10 m ²	Jln. Dumar Kota Tual	11.683.335.000
Jumlah			11.683.335.000

Tanah seluas 10,00 m² yang terletak di Jl. Dumar Kota Tual (Dullah Selatan) Kota Tual pada tanggal pelaporan dikuasi/digunakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

*Peralatan dan
Mesin Rp*
8,272.198.494

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual per 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 8,272.198.494,- untuk Tahun 2025 dan Rp7.591.595.314,- untuk Tahun 2024.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	7.591.595.314
Mutasi tambah:	
Pembelian	728.224.180
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi dari asset lainya ke aset tetap	0
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	8.272.198.494
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	8.272.198.494

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi Masuk

Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 728.224.180 adalah Pada tanggal 15 Desember 2025 telah dilakukan serah terima berupa 1 unit Kedaraan Ruda empat dan 1 buah Kendaraan roda 2 dan keperluan belanja barang lainnya sesuai BAST nomor KPB.413/DJPT.1/PL.450/V/2025

Mutasi kurang Penghentian penggunaan

Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Taul tadak ada Mutasi Kurang pada periode 2025

Gedung dan Bangunan
Rp23.863.312.181

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing adalah sebesar Rp23.863.312.181,- untuk Tahun 2024 dan Rp23.513.312.181,- untuk Tahun 2024 dengan Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	23.513.312.181
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	350.000.000
Pengembangan Melalui KDP	0
Mutasi Kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo Per 30 Juni 2025	23.513.312.181
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	23.863.312.181

Mutasi Tambah:

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari Berdasarkan BAST dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap nomor KPB.970/DJPT.1/PL.450/IV/2025 tanggal 17 Juni 2025. telah diserahkan berupa Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan yaitu rehab bangunan kantor utama senilai Rp. 308.904.000, maka nilai KDP tersebut dikapitalisasi dalam bangunan Gedung Kantor Permanen.

Mutasi Kurang:

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp760.360.240,- Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi

dan Jaringan

Rp830.394.227.5

00,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 830.394.227.500,- untuk Tahun 2024 dan Rp 80.244.227.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	830.244.227.500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Irigasi	150.000.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	830.394.227.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	830.394.227.500

Mutasi Kurang:

Berupa Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp0

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp967.675.500

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp967.675.500,- dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap
Lainnya (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	967.675.500
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2025	967.675.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	967.675.500

Untuk Aset Tetap Lainnya tidak terdapat mutasi tambah/kurang sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang masih dalam pengerjaan dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Konstruksi dalam per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- untuk Tahun 2024 dan Rp0,- untuk Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
-	-

Saldo Per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

Untuk pelaksanaan pekerjaan pada Tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2025 tidak terdapat pekerjaan yang dilakukan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) namun sampai dengan periode 31 Desember 2025 pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) telah selesai.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(719.445.587.005)*

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(719.445.587.005) untuk Tahun 2025 dan sebesar Rp(630.831.986.408),- untuk Tahun 2024.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

*Tabel xx
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	(8.272.198.494)	(6.637.360.859)	2.579.042.075
2.	Gedung dan Bangunan	(23.863.312.181)	(4.296.473.077)	32.726.335.036
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(830.394.227.500)	(8.420.307.554)	12.003.212.979
4.	Aset Tetap Lainnya	0	(0)	949.130.500
	Jumlah	(719.445.587.005)	(630.831.986.408)	48.257.720.590

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,- untuk Tahun 2024 dan Rp0,- untuk Tahun 2024.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak
Berwujud (dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

Mutasi Kurang:

Penghentian dari penggunaan berupa aplikasi penatausahaan PNBPN senilai Rp0,-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025 (dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Penatausahaan PNBPN	0
2.	Aplikasi Akuntansi Terpadu	0
	Jumlah	0

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,-

C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- untuk Tahun 2025 dan Rp0,- untuk Tahun 2024.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan pembayaran atas penghasilan/gaji pegawai PPNPN pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan dari penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

Mutasi :

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang sampai dengan 30 Juni 2025.

Aset Lain-Lain
Rp485,235.000

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp485,235.000,- dan sebesar Rp485,235.000,-, Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional PPN Tual.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-
lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0

Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari reklasifikasi peralatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp0,- dan tidak terdapat mutase kurang sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(336.247.265)*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(336.247.265) dan sebesar Rp(314.473.991) untuk tahun 2024.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan
Aset Lainnya TA 2025*

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	-0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	485,235.000	0	0
	Jumlah	485,235.000	0	796.917.542
	Total	485,235.000	0	803.933.167

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp374,306,688,-*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pelabuan Perikanan Nusantara Tual per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp374,306,688,- dan sebesar Rp169.633.930,- untuk Tahun 2024. hal ini merupakan tagihan atas pembayaran gaji PPNPM sampai dengan akhir Tahun Anggaran

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp0*

C.5.1 Uatng Yang Belum Ditagihkan

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pelabuan Perikanan Nusantara Ambon per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- untuk Tahun 2024. Nilai ini merupakan tagihan yang belum di SPM kan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp21,687,304*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing sebesar Rp21,687,304,- dan Rp43.498.520,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Pelabuan Perikanan Nusantara Ambon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gaji PNS Induk	21,687,304
2.	Gaji PPPK Induk	

3.	Gaji induk PPNP	0
4	Pembayaran termin ke 3 rehab rumah ibadah	0
5	Pembayaran belanja modal pembuatan trotoar	0
6	Perjalanan dinas pegawai	0
Total		21,687,304

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp352.619.384,-*

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp352.619.384,- dan sebesar Rp126.135.410,- untuk Tahun 2024. Sampai dengan periode laporan semester II Tahun 2025 terdapat pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun belum melakukan Pembangan Fisik dan blm di manfaatkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa Sewah Lahan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	0
Pendapatan Sewah Lahan	352.619.384
Jumlah	352.619.384

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,-*

C.5.4. Uang Muka dadi KPPN

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- pada Tahun 2024.

Uang muka (UM) dari KPPN, atau dikenal juga sebagai Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP), adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada satuan kerja (satker) sebagai uang muka kerja. Uang muka ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak bisa langsung dibayarkan melalui mekanisme LS (langsung) dan belum membebani alokasi anggaran satker.

Tabel xx
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	0
Jumlah	0

Ekuitas

Rp

154.577.291.832

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 154.577.291.832,- dan sebesar Rp 242.203.281.666,- untuk Tahun 2024.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp1,969,861,814

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1,969,861,814,- dan sebesar Rp1,874,134,017,- untuk Tahun 2024, Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Perlatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	399.269.500	12.352.817	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	68.103.230	128425.000	0
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	441.810.516	608.336.0389	0

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi dan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dan Pendapatan lain-lain

*Beban
Pegawai*
5.554.040.624

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.554.040.624,- dan sebesar Rp5.248.315.887,- untuk Thun 2024, Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.435.677.680	1.342.072.700	
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.187	20.103	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	94.142.070	91.693.950	
Beban Tunj. Anak PNS	32.960.182	29.788.180	
Beban Tunj. Struktural PNS	16.380.000	25,200,000	
Beban Tunj. Fungsional PNS	140.564.000	147.804.000	
Beban Tunj. PPh PNS	12.776.535	10.954.184	
Beban Tunj. Beras PNS	77.923.920	75.027.120.	
Beban Uang Makan PNS	230.737.000	177,769.050	

Beban Tunj. Umum PNS	32.755.000	26.250.000.	
Beban Gaji PPPK	59.7708.800	548.994.400	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.016	11.069	
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	32.541.070	30.558.990	
Beban Tunj. Anak PPPK	8.080.524	7.956.770	
Beban Tunj. Fungsional PPPK	75.600.000	79.980.000	
Beban Tunj. Beras PPPK	34.182.240	31.937.220	
Beban Uang Makan PPPK	124.202.000	94.826.000	
Beban Uang Lembur	0	25,320,000	
Beban Uang Lembur PPPK	0	47,814,000	
Bepan Pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan/kinerja	1.837.850.060	1.7943.596.100	
Bepan Pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan/kinerja PPPK	791.678.340	734.865.751	

*Beban
Persediaan
Rp34.205.000*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.205.000,- dan Rp27.246.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban
Persediaan TA 2025
dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	34.205.000	27.246.000	0
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	34.205.000	27.246.000	0

Beban Barang
dan Jasa
Rp2.022.649.77
9

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.022.649.779,- dan sebesar Rp2.421.441.862,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain- lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban- beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	695.055.250	733.217.340	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	0	556.000	
Beban Honor Operasional Satker	92.940.000	117.948.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	57.031.100	66.424.000	
Beban Bahan	48.363.000	48.028.900	
Beban Honor Output Kegiatan	0	6.000.000	
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	6.560.000	
Beban Langganan Listrik	94.090.611	189.619.294	
Beban Langganan Air	24.310.430	5.796.000	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	53.501.000	

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	
Beban Jasa Profesi	-	3.600.000	
Beban Jasa Konsultan	0	0	
Beban Sewa	0	0	
Beban Jasa lainnya	1.010.859.388	1.189.869.576	

*Beban
Pemeliharaan
Rp660.934.450*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp660.934.450,- dan sebesar Rp728.901.147,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025
dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	399.075.300	294.399.147	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.772.150	307.390.500	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	32.410.000	24.910.000	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	48.158.000	
Beban Pemeliharaan Jaringan	33.047.000	98.990.000	

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp84.264.210

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp84.264.210,- dan Rp1.174.990.357,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat2 koordinasi yang Hampir semuanya menggunakan ZOM Miting akibat Penghematan dari Program Pemerintah.Pusat.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	69.218.210	710.709.001	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.170.000	26.081.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	6.000.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.876.000	432.200.356	

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp88.691.492.371,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp88.691.492.371,- dan sebesar Rp88.711.152.626,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	404.431.580	352.306.480	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	610.253.449	606.613.143	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	87.526.981.972	87.526.981.973	
Beban Penyusutan Irigasi	109.713.438	186.673.438	
Beban Penyusutan Jaringan	18.338.658	14.789.696	
Jumlah Penyusutan	88.669.719.097	88.711.152.626	
Beban Amortisasi Software	0	0	
Beban Penyusutan Aset Tetap Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	21.773.274	23.787.896	

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	0	0

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

*Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non
Operasional TA 2025 dan
2024 (dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Selisih Kurs	0	0	0
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

*Pos Luar
Biasa Rp0,-*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp242.203.281.666*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp242.203.281.666,- dan sebesar Rp330.847.498.555,-

Surplus/Defisit
LO
Rp(95.832.498.491
)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(95.832.498.491) dan Rp(98.682.204.172). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas Rp0

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(2.301.407) Rincian Koreksi Yang Menambah Ekuitas untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Yang Menambah Ekuitas TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
2.	-	0
Jumlah		0

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0,-

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(2.301.407),-
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-
lain Rp0,-

E.3.2 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Penyisihan Piutang	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas
Rp8.206.508.657
, -

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.206.508.657,- dan sebesar Rp10.040.288.690,-
Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	8.206.508.657
Ditagihkan ke Entitas Lain	
Jumlah	8.206.508.657

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025 dan 2024, DDEL sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.5.2. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Sepertihalnya DDEL maka Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025 dan 2024, DKEL sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Ekuitas Akhir
Rp154.577.291.832
, -

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp154.577,291,832,- untuk Tahun 2025 dan sebesar Rp242.203.281.666,- untuk Tahun 2024.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Khusus untuk UAKPA PPN Tual penunjukan KPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 82/MEN/KU.611/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kuasa Pengguna Anggaran : **Recky Pangemanan, S.St.Pi**
2. Penunjukan Pengelola Keuangan pada UAKPA PPN Tual dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 72/PA-KPA/2025 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran Nomor 9/PA-KPA/2025 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.
- Pejabat Pembuat Komitmen : **Mohammad Asriadi,S.Pi,M.Si**
- Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : **Dessyana.E,Haurissa, S.Pi**
3. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang pada akhir tahun(31Desember)2025 senilai Rp 34.388.615 atas PYMHD Jasa Tambat Labuh 8 buah Kapal yang telah dilakukan proses pembayaran sebanyak 6 buah Kapal dan sisa 2 buah kapal yang blm melakukan aktifitasnya di Fishing Groun .
4. Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp21.687.304 yang merupakan gaji dan Tunjangan Kinerja 1 Orang PNS atas bulan Oktober,November dan Desember 2025 yang dilakukan penahanan gaji oleh Kepala Pelabuhan atas Hukuman/Pelanggaran serta, Tujuangan kinerja 2 orang Pegawai PPPK yang dilakukan di karenakan defesit Anggaran Khususnya tunjangan kinerja PPPK
5. Transfer Masuk yang berasal dari dari Isalon I KKP berupa Priter Rp 11.330.000,00, yang digunakan untuk keperluan perkantoran.

LAMPIRA

